

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan atau memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya pada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan dijelaskan bahwa laporan

keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Standar akuntansi pemerintah merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintah yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan sangat penting dalam suatu instansi pemerintahan atau organisasi tertentu karena dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan suatu keberhasilan instansi tersebut. Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2007: 11). Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah untuk dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan instansi sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang handal dan dapat dipercaya. Untuk itu, laporan keuangan yang dibuat hendaknya harus berkualitas dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta

secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kualitas dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kurangnya kualitas laporan keuangan sering menjadi permasalahan dalam suatu instansi tertentu termasuk pada pemerintah daerah di Indonesia yaitu pada SKPD masing-masing daerah di Indonesia. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Agar dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan tersebut maka SKPD harus dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan pada SKPD maka akan lebih mudah dalam menentukan keputusan yang dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari BPK. Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap

laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau disebut juga Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seperti berikut :

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terjadi setiap tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013. Menurut R. Rita Dewi P. Selaku Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat mengemukakan bahwa sampai saat ini masih ada masalah yang terjadi, masalah pertama yaitu ketidakcocokkan data aset yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ketidakcocokkan ini umumnya soal adanya dana yang tercatat ganda, atau adanya daftar

aset yang tercatat, namun sebenarnya tidak ada setelah ditelusuri ke lapangan. Sehingga mengenai total keseluruhan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama nominalnya masih belum bisa memberikan data yang pasti, masalah kedua yaitu penyajian persediaan yang tidak memadai, masalah ketiga yaitu penyajian penyertaan modal pemerintah yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Rully A Hadiyat ; 2013).

Pemerintah Kab. Bandung Barat kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014. Opini yang diraih Kabupaten Bandung Barat karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi, terutama menyangkut penatausahaan aset di beberapa SKPD yang hingga kini masih belum ada titik temunya.

Menyadari masih adanya kelemahan dalam pemerintahan yang dipimpin Abubakar, Ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi dan memerintahkan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini kerap menjadi pengganjal tersebut secepat mungkin. (Galuh M Raffi ; 2014).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mendapatkan opini Wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini kelima kalinya Kabupaten Bandung Barat gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyebab gagalnya Pemkab meraih opini WTP pada LKPD tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni soal pengelolaan aset.

Selain itu, masalah lainnya, yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Opini WTP dari BPK harus menjadi target bersama agar terbukti bahwa sistem pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat menjunjung tinggi akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya. (Septra f ; 2016).

Fenomena lain yang terjadi menyangkut kualitas laporan keuangan yaitu di Kota Bandung, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas.

Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 triliun. Ia menjelaskan, masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu. Namun ia optimis, tahun ini sisa pekerjaannya akan tuntas. Pada pemeriksaan kali ini, pemerintah kota perlu memperhatikan empat faktor lagi untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keempat faktor itu antara lain aset, pengadaan, piutang pajak, dan utang jangka pendek. (Muhammad Ibnu S 2015).

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer public dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (*Hardware* dan *Software*) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu (Andriani, 2015 : 71).

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisasi terjadi kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Nahartyo, 2016). Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut,

dan kendala lainnya adalah keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Karmila, 2016 : 28).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Hamzah, 2016).

Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Sistem pengendalian internal

yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh suatu organisasi dengan tujuan menjamin keandalan catatan baik keuangan dan non keuangan seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Badara, 2016 : 18). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: (a) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; (b) Keandalan Laporan Keuangan; (c) Pengamanan aset negara; dan (d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*Scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*Watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 537 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2017 menemukan 6.053 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan

struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>		
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan.	2.156
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.	2.657
3.	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern.	1.240
	Jumlah	6.053

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I 2017

BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 2.525 kasus yang meliputi belanja yang tidak sesuai/melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan/barang, pembayaran honorarium ganda dan/ melebihi standar, spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/barang, dan kerugian lainnya dengan total kerugian sebanyak 1,13 triliun.

BPK juga telah melakukan audit atas LKPD selama lima tahun, dari tahun 2012-2016. BPK memberikan opini *Unqualified* atau *Qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan keuangan daerah semakin memburuk setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari tahun 2012-

2016 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin meningkat, wajar dengan pengecualian (WDP) tidak memiliki banyak perubahan, tidak memberikan pendapat (TMP) menurun dari tahun ke tahun, bahkan opini tidak wajar (TW) terjadi kenaikan . Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016

LKPD (Tahun)	Opini			
	WTP %	WDP %	TMP %	TW %
2012	23%	61%	15%	1%
2013	30%	59%	9%	2%
2014	47%	46%	6%	1%
2015	58%	35%	6%	1%
2016	70%	26%	4%	0%

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I 2017

Masih sedikitnya penelitian tersebut dan perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan, ada penambahan satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati (2016) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. (survey pada pemerintah daerah cianjur). Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan dan parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan sebesar 80%. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen, Tuti Herawati hanya meneliti Sistem Pengendalian Intern, sedangkan penulis menambahkan variabel independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi. Perbedaan lainnya adalah Tuti Herawati meneliti di pemerintah daerah Cianjur, sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel independen. Penulis meneliti tentang pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan As Syifa Nurillah meneliti Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kemudian perbedaan lainnya adalah As Syifa Nurillah meneliti di SKPD Kota Depok, sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian As Syifa Nurillah pada tahun 2014. Alasan memilih variabel tersebut karena, penelitian mengenai kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan, namun, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, penulis memilih judul : **“PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Survey pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat).”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah kota maupun kabupaten dalam pengelolaan aset banyak yang tidak transparan dan akuntabel.
2. Masih banyak pemkot maupun Pemkab yang belum bisa memanfaatkan teknologi informasi (*Hardware* dan *Software*) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.
3. Sistem pengendalian internal yang belum efektif menyebabkan Pemkab maupun Pemkot mendapatkan kendala dalam kualitas laporan keuangan.

4. Masih terdapat pemkab maupun Pemkot yang melakukan belanja yang tidak sesuai/melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan/barang, pembayaran honorarium ganda dan/ melebihi standar, spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, maupun kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/barang belanja.
5. Terdapat kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana.

1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimanakah Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimanakah Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

5. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai konsep-konsep pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian internal dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik dalam instansi pemerintah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Yang beralamat Jl. Raya Padalarang cisarua Km 2 ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.